KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Rencana pembangunan Gedung DPR berlanjut
Tanggal : Sabtu, 02 September 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 5

Rencana Pembangunan Gedung DPR Berlanjut

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengecek kondisi gedung.

Hussein Abri Dongoran
Hussein.abri@tempo.co.id

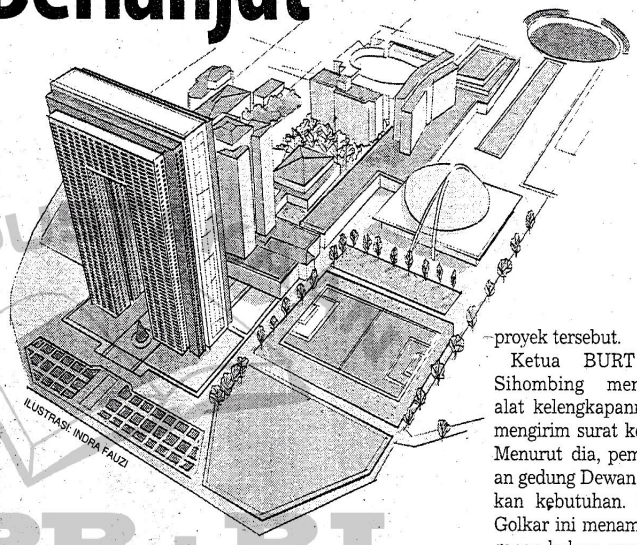
JAKARTA – Rencana pembangunan gedung baru untuk Dewan Perwakilan Rakyat terus berlanjut. Kali ini para anggota Dewan meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memeriksa gedung para wakil rakyat itu sebagai bagian dari proses pembangunan gedung baru yang diusulkan DPR. "Tim akan dibentuk pekan ini dan langsung turun ke lapangan," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, kemarin.

Pembentukan tim, ujar Basuki, merupakan jawaban dari surat yang dilayangkan DPR pada pekan lalu. Nantinya, kata dia, tim itu terdiri atas Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) serta Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Menurut dia, tugas tim Balitbang akan fokus memeriksa struktur teknis Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, yang menjadi ruang kerja anggota Dewan. Adapun Direktorat Jenderal Cipta Karya akan mengukur aspek kapasitas yang dikeluhkan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Kepala Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum, Danis Sumadilaga, mengatakan terakhir kali gedung Dewan diperiksa adalah pada 2009. Dan ketika itu, kondisinya dinyatakan layak digunakan.

Dewan memang kerap kali mengeluhkan Gedung Nusantara I dan kapasitasnya. Beberapa waktu lalu, DPR menyebut gedung itu miring tujuh derajat. Sedangkan BURT DPR mengklaim bahwa kapasitas Gedung Nusantara I hanya 800 orang, tapi ditempati oleh 4.480 orang.

Basuki memastikan timnya nanti akan membuktikan apakah gedung tersebut memang miring atau tidak. "Apa benar ada miring tujuh derajat, keretakan struktural, atau tidak. Dan itu semua akan dilihat," ujarnya.



ILUSTRASI: INDRA FAUZI

Rencana pembangunan gedung DPR kembali mencuat tahun ini. Musababnya, Dewan kembali mengajukan anggaran pembangunan gedung dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018. Pembangunan akan dilakukan dengan skema tahun jamak selama empat tahun.

Rencana pembangunan gedung dan alun-alun demokrasi merupakan dua dari tujuh megaproyek yang diajukan DPR sejak 2015. Lima proyek yang diajukan Dewan ketika itu adalah museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke gedung DPR, *visitor center*, ruang pusat kajian legislasi dan integrasi kawasan tempat tinggal, serta tempat kerja anggota DPR. Ketika itu, Dewan mengusulkan Rp 1,6 triliun untuk membangun tujuh proyek tersebut.

Ketua BURT Anton Sihombing menuturkan alat kelengkapannya yang mengirim surat ke Basuki. Menurut dia, pembangunan gedung Dewan merupakan kebutuhan. Politikus Golkar ini menampik anggapan bahwa pembangunan itu merupakan langkah pemborosan uang negara. "Yang mewakili rakyat itu kami," ujarnya, Kamis lalu.

Adapun Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyerahkan urusan pembangunan ini kepada pemerintah. Dia pun meminta semua pihak sabar menunggu hasil pengecekan yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum. "Kalau dibangun, alhamdulillah. Kalau tidak, juga alhamdulillah," katanya.

● YOHANES PASKALIS PAE DALE | DIAS PRASONGKO